

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang berhasil dibawa masuk oleh para pedagang ke Indonesia. Para pedagang yang berasal dari Persia, Gujarat, India dan Arab. Tujuan mereka bukan hanya sekedar berdagang melainkan juga untuk menyebarkan agama Islam.¹ Para pedagang itu pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Sumatera. Kemudian secara perlahan-lahan, Agama Islam semakin menyebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Islamisasi di Pulau Jawa menjadi proses yang sangat massif mengingat Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang padat. Selain itu, penerimaan ajaran Islam di sana berkembang secara pesat sejak awal penyebarannya. Salah satu strategi yang dilakukan untuk menyebarkan Islam secara massif adalah pelibatan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam dan peran Walisongo.² Selain diwarnai oleh kisah-kisah Walisongo di tanah Jawa yang sangat berperan dalam melakukan Islamisasi di Nusantara, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menjadi faktor penting lainnya untuk menentukan Islamisasi berkembang secara massif. Begitu juga halnya dengan Kerajaan Mataram Islam, pada awal sebelum berdirinya, Ki Ageng Pemanahan diberikan hadiah sebagai bentuk balasan jasa berupa tanah oleh Sultan Hadiwijaya. Pemberian tanah yang terletak di pedalaman Jawa ini berdiri di atas wilayah Alas Mentaok merupakan peninggalan kekuasaan kerajaan Mataram Kuno yang runtuh pada tahun 929 M. Raden Dedep Tulis, Tumenggung Mayang, dan orang tua Ki Ageng Pemanahan yaitu Nyi Ageng Ngenis mulai hijrah ke Alas Mentaok dan mendirikan

¹ Marsono. 2021. *Akulturası Islam dalam Budaya Islam: Analisis Semiotik Teks Lokajaya dalam Lor*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm: 30.

² *Op. Cit.*, hlm: 6.

kediaman dekat pohon beringin yang pernah ditanam oleh Sunan Kalijaga.³ Walaupun daerah ini masih berupa tanah perdikan, akan tetapi pemilik tanah tetap harus melaporkan dan membayarkan upeti kepada Kerajaan Pajang yang pada saat itu masih berkuasa di sana.

Alas Mentaok dari waktu ke waktu menjadi semakin ramai. Karena banyak saudagar dan warga dari luar berdatangan, dan kemudian mendirikan pemukiman dan menetap di sana. Semenjak itulah, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi pemimpin bagi masyarakatnya. Meski tanah yang mereka tempati masih berupa tanah perdikan, akan tetapi setiap penduduk wajib melapor dan membayar upeti kepada Kerajaan Pajang. Tak lama setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, Kerajaan yang masih berbentuk Kadipaten Mataram dan berada di bawah Kesultanan Pajang ini akhirnya memisahkan diri dari Kesultanan Pajang. Pemisahan kekuasaan ini dilakukan oleh Panembahan Senapati yang merupakan penerus tahta setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia.⁴

Meninggalnya Ki Ageng Pamanahan dan kemudian dimakamkan di halaman rumahnya yang berdekatan dengan makam ayahnya yang bernama Ki Ageng Ngenis. Terdapat perbedaan terkait kapan persisnya Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia. Ada yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Pamanahan meninggal pada tahun 1576 M.⁶ Ada juga yang menyebutkan beliau meninggal pada tahun 1584 M.⁷ Berita meninggalnya Ki Ageng Pamanahan sampai juga kepada Sultan Hadiwijaya melalui Ki Juru Martani.⁵ Sultan Hadiwijaya pun memerintahkan 2 orang utusan untuk mengunjungi Danang Sutawijaya yang merupakan putra Ki Ageng Pamanahan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Mataram masih setia pada Panembahan Pajang ataukah tidak. Mengingat Danang Sutawijayalah yang mengambil kekuasaan sepeninggal ayahnya.

³ V. Wiranata Sujarweni. 2017. *Menyusuri Jejak Mataram Islam di Yogyakarta. (PT. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta)*, hlm: 20-21.

⁴ Munawar, Zaid. 2020. *Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung 1613-1645 M. Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 4 No. 1*, hlm: 10.

Tapi sayangnya, utusan Sultan Hadiwijaya tidak berhasil menemui Danang Sutawijaya yang pada saat itu sedang pergi berkuda. Sudah menjadi kebiasaan Danang Sutawijaya untuk berkuda pada tengah malam ditemani 5 orang pengawalnya menuju Lipuro. Danang Sutawijaya ke sana untuk tidur di atas sebuah batu hitam halus yang disebut Kumulus. Tak lama kemudian terjadi fenomena unik berupa munculnya bintang yang berukuran sebesar buah kelapa. Hal ini diisyaratkan bahwa Danang Sutawijaya kelak akan menjadi penguasa tanah Jawa dan menjadi Raja Mataram Islam yang sukses. Kehadiran bintang tersebut diketahui oleh pamannya yaitu Ki Juru Martani yang kemudian menyarankan Danang Sutawijaya agar lebih mendekatkan diri pada Gusti Pangeran, agar selalu diberikan kemudahan. Selain itu, Ki Juru Martani juga menyarankan agar Danang Sutawijaya untuk menemui penguasa Laut Selatan dan Merapi sebagai langkah awal membangun pemerintahan yang berdaulat. Karena hal ini, dibagilah tugas antara Ki Juru Martani yang menemui penguasa Merapi dan Danang Sutawijaya untuk menemui Nyi Roro Kidul penguasa laut selatan. Danang Sutawijaya menempuh perjalanan melalui jalur Sungai Ompak dan berenang menggunakan kayu Tunggul Wulung yang berdiameter Panjang 5 meter dan lebar 25 centimeter. Setelah Sutawijaya bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan membuat kesepakatan bersama yang digelar di Cepuri Parangkusumo,⁵ sejak saat itu lah seluruh Raja-raja Mataram memiliki kesepakatan secara tidak tertulis dengan Penguasa Laut Selatan tersebut.

Berkaitan dengan kehidupan pribadinya, Sutawijaya memiliki dua orang permaisuri dan dua orang selir. Permaisuri pertamanya adalah Ratu Mas Kita Jawi dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Retno Dumilah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan selir yang bernama Roro Ayu Mas Semangkin, Sutawijaya memiliki seorang putra yang diberi nama Raden Rangga, dan dari selir keduanya yaitu Nyai Adisari, Sutawijaya dikaruniai seorang putra bernama Raden Mas Kentol Kejuron atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Puger. Mendengar semakin berjayanya Mataram dan kondisi kekuasaan Sutawijaya yang memiliki calon penerus membuat Hadiwijaya merasa gelisah. Hingga

⁵ V. Wiranata Sujarweni, Op. Cit. hlm: 25-27.

akhirnya, Sultan Hadiwijaya mengutus putranya yang bernama Pangeran Benawa didampingi oleh Patih Mancanegara dan Arya Pamalad yang merupakan menantu dari Sultan Hadiwijaya. Sesampainya para utusan ini ke Mataram, mereka dijamu dengan pesta yang istimewa. Akan tetapi, di tengah-tengah pesta berlangsung, Arya Pamalad tiba-tiba menyerang dan akhirnya Raden Rangga tidak sengaja telah membunuh salah seorang pengawal Panembahan Pajang yang diutus bersama Pangeran Benawa. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya dengan memfitnah Sutawijaya atas tragedi ini. Menyaksikan apa yang terjadi, Pangeran Benawa membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa apa yang terjadi hanya sebuah kesalahpahaman saja.⁶

Sutawijaya berhasil mendirikan kerajaannya selama satu dekade mulai dari tahun 1578 – 1588 M. Semenjak itulah, Sultan Sutawijaya diberi gelar Sultan ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah yang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati. Dalam Bahasa Jawa Kawi, berarti rakyat jelata menjadi raja (Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati). Meski dikenal sebagai seorang pemimpin yang ulung, Sutawijaya tidak selalu berhasil memenangkan pertempuran. Pernah memenangkan pertempuran melawan Madiun pada 1590 M, Sutawijaya juga pernah mengalami kekalahan. Beberapa catatan kealahannya dalam memimpin pertempuran, di antaranya adalah saat melawan Belanda pada 1597 M, Tuban pada tahun 1589-1599 M. Dalam kesempatan lain, Sutawijaya juga pernah berhasil meredam pemberontakan di Pati pada tahun 1600 M.⁷

⁶ *Ibid.* hlm:25

⁷ Rizal Zamzami, *Op. Cit.*, hlm: 155-156.

Tatanan pemerintahan Sutawijaya memiliki konsep kekeluargaan dalam kesatuan dan keimanan. Pada tahun 1575-1755 M, Sutawijaya mengantarkan Mataram pada kekuasaan yang stabil. Saat itu, Mataram dikenal dengan istilah “Agung Binatara atau dalam bahasa pewayangan disebut “*Gung Binathara Bau Dhandha Nyakrawati*” yang berarti besarnya kekuasaan Dewa, pemerintahan, hukum dan kekuasaan. Dalam konsep ini, seorang raja yang baik harus memiliki karakter berupa “*Anjaga tata titi tentreming praja*” atau mampu menjaga ketentuan dan ketentraman rakyat, berbudi luhur, “*Ambeg adil paramarta*” atau mampu menjaga keadilan kepada semua rakyat dan tidak boleh ada perbedaan status sosial dalam pemerintahan, “*Wicaksana*” atau bijaksana, dan “Menang 12 wasisa ing sanagari” atau berkuasa di seluruh negeri.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Mataram Islam?
2. Bagaimana pola pemerintahan Mataram Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui sejarah berdirinya Mataram Islam.
2. Mengetahui pola pemerintahan Mataram Islam.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi dan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah

⁸ Zaid Munawar. 2020. *Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung 1613-1614 M. Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 4 No. 1.* hlm.: 12.

kebudayaan Islam. Terutama yang berkaitan dengan kajian perkembangan dan keruntuhan Kesultanan Mataram Islam.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan:

- a. Menambah wawasan sekaligus pengetahuan tentang Kesultanan Mataram Islam termasuk sejarah awal pendirian, kemajuan dan kemundurannya.
- b. Menjadi referensi yang komprehensif bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti sejarah Kesultanan Mataram Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian sistematis mengenai tema penelitian yang penulis kumpulkan. Pengkajian ini dilakukan dengan mencari relevansi topik kajian yang diangkat. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya penulis melacak teori maupun konsep yang sudah terlebih dahulu ditemukan. Agar tidak perlu terjadi repetisi dalam tema yang sama. Berikut ini tinjauan pustaka yang berhasil penulis temukan selama penyusunan penelitian ini:

1. Artikel jurnal berjudul “*Sejarah Agama Islam di kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senopati 1584-1601*”, tulisan Rizal Zamzami yang diterbitkan oleh JUSPI atau Jurnal Sejarah Peradaban Islam Volume 2 Nomor 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam artikel ini, penulis mendeskripsikan tentang awal berdiri dan masa akhir Kerajaan Mataram Islam. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada deskripsi mengenai perkembangan Agama Islam Kejawen dan santri yang tidak ada dalam penelitian ini.
2. Artikel jurnal berjudul “*Pengelolaan pajak di kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung, 1613-1645 M*” ditulis oleh Zaid Munawar dan diterbitkan oleh *JUSPI, Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Volume 4 Nomor 1 dari Universitas Nahdlatul Ulama di Kota Surakarta. Penulis mendeskripsikan pada sejarah Mataram Islam dari awal sampai akhir.

Sementara itu, penelitian ini hanya akan mengkaji fokus pada Mataram Islam masa Sultan Agung saja.

3. Skripsi berjudul “*Cirebon di Bawah Kekuasaan Mataram tahun 1613-1645 M: Kajian Politik Historis Mengenai hubungan Politik, Sosial dan Agama*” ditulis oleh Moh. Rahmat Hidayat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mendeskripsikan tentang sejarah Kerajaan Mataram dari awal sampai akhir masa keruntuhannya, serta faktor penyebab. Meski memiliki kesamaan ruang lingkup, akan tetapi penelitian ini lebih fokus pada pemerintahan Mataram Islam serta hubungan politiknya.
4. Skripsi yang berjudul “*Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755 – 1830 M*”. Skripsi ini ditulis oleh Komar Faridi yang diterbitkan oleh Digital Repository University yang membahas tentang Kerajaan Mataram Islam secara lebih kompleks.

E. Landasan Teori

Dalam konteks kekuasaan, sebuah negara atau dalam hal ini kerajaan akan dianggap sebagai sebuah kerajaan yang sah secara *de facto* dan *de jure* jika memiliki unsur-unsur seperti rakyat, daerah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan atas fakta. Unsur rakyat menjadi unsur penting yang ditunjukkan bukan hanya dari sekelompok orang yang berada di tempat tertentu, tapi juga keinginan mereka untuk bersatu. Unsur daerah atau wilayah merupakan unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif diakui di seluruh negara bersangkutan. Unsur pemerintahan yang berdaulat dimaknai dengan kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Berdaulat ke dalam artinya adalah merupakan pemerintah atau penguasa yang berwibawa. Berdaulat ke luar artinya adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lainnya. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan atas fakta adanya negara dan pengakuan *de jure* adalah pengakuan atas sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum.

Unsur-unsur dari negara itu harus diatur oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah negara. Agar negara bisa berjalan secara teratur dan dapat mewujudkan cita-citanya sebagai sebuah negara. Pengaturan itu harus bersifat sah dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Inilah yang bisa diwujudkan dalam bentuk kekuasaan ataupun pemerintahan. Kekuasaan itu sendiri bisa dibentuk dan diperoleh secara sah dalam bentuk pemilihan umum, keturunan atau secara tidak sah (inkonstitusional) melalui kudeta, perang, atau menggulingkan kekuasaan dalam bentuk konspirasi. Perebutan kekuasaan ini harus menggunakan alat yaitu politik. Meski politik bukan satu-satunya cara, akan tetapi seluruh penggunaan kekuatan ataupun pemaksaan kehendak dari orang ataupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan serta upaya dalam mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Perebutan kekuasaan yang ditampilkan cenderung diwarnai dengan motivasi politis.

Kekuasaan bisa didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Bermula dari keinginan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Lalu mereka bersedia jika ada seseorang ataupun sekelompok orang yang akan memimpin mereka. Pemimpin tersebut bisa jadi berasal dari luar, ataupun dari kalangan mereka sendiri. Seorang pemimpin yang berkuasa harus memiliki keabsahan (legitimasi) yang merupakan kesesuaian antara suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.⁹ Legitimasi diperoleh jika seseorang diangkat, dan dianggap sah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya.¹⁰ Beberapa cara untuk mengetahui legitimasi seseorang ataupun kelompok *pertama*, *legitimate power* atau kekuasaan yang diperoleh melalui pengangkatan. *Kedua*, *coersive power* atau kekuasaan yang diperoleh dengan jalan kekerasan atau bahkan melalui aksi bersenjata dan di luar jalur konstitusi. *Ketiga*, *expert power* atau kekuasaan yang diperoleh melalui keahlian seseorang.

⁹ Inu Kencana Syafii. Alquran dan Ilmu Administrasi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 71.

¹⁰ *Op. Cit.* hlm: 16

Keempat, reward power atau kekuasaan yang diperoleh dari pemberian. *Kelima, reverent power* atau kekuasaan yang diperoleh karena daya tarik seseorang.

Lebih jauh berbicara tentang kekuasaan, setidaknya ada dua konsep mengenai ini yang bisa dijadikan landasan berpikir yaitu konsep “*Power to*” dan “*Power over*”.¹¹ Konsep “*power to*” dianggap sebagai konsep paling dasar dalam penggunaan terminologi “*power*” atau kekuasaan yang merujuk pada tindakan. Konsep ini lebih melihat pada kekuasaan dari seorang aktor atas aktor lainnya sebagai bagian terpenting dalam melihat kekuasaan politik. Sedangkan konsep “*Power over*” merujuk pada kekuasaan di atas kekuasaan. Kedua hal ini menunjukkan penggunaan kekuasaan yang membawa hasil-hasil tertentu.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*methodos*” yang bisa diartikan sebagai cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode tentu saja berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang berkaitan.¹² Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) yang bisa didefinisikan sebagai sebuah periodisasi ataupun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam suatu penelitian, sehingga dengan data yang ada dapat mencapai hakekat sejarah.¹³ Dengan kata lain, seorang peneliti dituntut untuk bisa menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data otentik dan terpercaya, serta usaha sintesis terhadap data yang menjadi kisah sejarah yang bisa dipercaya.¹⁴

Metode sejarah dalam definisi lainnya bisa diartikan sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dilakukan untuk membantu secara efektif dalam proses pengumpulan bahan-bahan sumber sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber tersebut secara kritis, dan

¹¹ Keith Dowding. *Power*. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986). hlm: 4-5.

¹² Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hml: 40.

¹³ Tim Penyusun, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama APTik dengan penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama 1993), hlm: 44

¹⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm: 74

disajikan dalam bentuk hasil “*sinthese*” dari hasil yang dicapai.¹⁵ Sejarah dalam hal ini merupakan peristiwa yang meliputi empat unsur pembentuknya yaitu tempat, waktu, latar belakang dan pelaku dari peristiwa sejarah tersebut. Maka menjadi hal yang wajar jika kemudian kajian sejarah meyakini bahwa segala peristiwa yang sudah terjadi itu bisa ditelusuri berdasarkan kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.¹⁶ Dalam penerapannya, metode ini meliputi tahapan-tahapan berupa heuristik, verifikasi, interpretasi data dan historiografi.

1. Heuristik (Pengumpulan Data).

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.¹⁷ Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan objek penelitian. Semua jenis tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan sejarah menempatkan sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah, kisah masa lalu tidak bisa direkonstruksi oleh sejarawan. Penentuan sumber sejarah sendiri, akan mempengaruhi tempat di mana atau siapa sumber informasi lisan, serta cara memperoleh informasi yang akan digunakan untuk penelitian. Sumber sejarah dalam hal ini terdiri dari tiga kategori yaitu sumber tulisan, lisan dan benda. Ketiganya bisa dilakukan sekaligus jika itu memungkinkan.¹⁸

Adapun ketiga sumber sejarah yang ada dalam penelitian sejarah adalah *pertama*, sumber tulisan yaitu jejak masa lalu yang mengandung informasi dalam bentuk tulisan yang bisa berupa informasi primer¹⁹ maupun sekunder.²⁰

¹⁵ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah dari Riset Hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hal. 11.

¹⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 46

¹⁷ Tajul Arifin, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 93

¹⁸ *Ibid.* hlm: 94

¹⁹ Informasi primer berkaitan dengan pengetahuan tentang peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktunya sama) saat peristiwa tersebut terjadi. Bisa berupa arsip, catatan perjalanan, risalah sidang, daftar hadir peserta, dan lain sebagainya. *Ibid.*

²⁰ Sumber sejarah tidak langsung yang berbentuk laporan hasil penelitian, karya ilmiah, biografi dan lainnya. *Ibid.*

Kedua, sumber tulisan yaitu informasi tentang suatu peristiwa, baik yang disampaikan secara turun-temurun (*oral tradition*) maupun langsung dari pelaku sejarah (*oral history*). Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi adalah penyeleksian data, apakah data itu akurat atau tidak baik dari segi bentuk maupun isinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sumber itu tertulis maka perlu diteliti dari segi fisik dan isinya, sedangkan sumber lisan dicari informasinya tidak hanya dari satu informan. Dengan langkah ini diharapkan dapat diperoleh data yang valid dan kredibel. Dengan kata lain verifikasi dilakukan dalam rangka menyeleksi keakuratan semua sumber yang berkaitan baik dalam bentuk buku, majalah, artikel, skripsi dan lain-lain.

2. Interpretasi Data (Analisis Data).

Interpretasi yaitu penafsiran data yang telah teruji kebenarannya.²¹ Pada tahap ini dilakukan pemahaman dan analisis data, sehingga didapatkan data atau informasi yang benar, sehingga memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah.²² Setelah mendapatkan data yang akurat, penulis mulai menganalisis data untuk lebih memahami isinya.

3. Historiografi (Penulisan Sejarah).

Tahap ini adalah tahap terakhir dari penelitian, yaitu penulisan sejarah dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain. Proses ini memperhatikan aspek-aspek kronologis sehingga menjadi rangkaian peristiwa yang tidak terputus.²³ Setelah memahami rangkaian sejarah dari beberapa sumber, dalam tahap ini penulis mulai menorehkan tulisan dengan menghubungkan semua rangkaian peristiwa yang terjadi.

²¹ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 63.

²² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 1991.

²³ Denis Guritno Sri Sasongko, *HISTORIOGRAFI*, Universitas Indraprasta PGRI, 2018. hlm: 4

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan penulisan penelitian yang akan dikembangkan, penulis memaparkan sistematika pembahasan di bawah ini.

Bab Pertama, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Uraian dalam bab ini merupakan susunan dasar yang kemudian menjadi pijakan dan memberikan kemudahan untuk memahami bab selanjutnya. Bab Kedua, berisikan tentang masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam berikut deskripsi wilayah dan keunggulan geografis.

Bab Ketiga, berisi Biografi Sultan-sultan Mataram Islam. Bab Keempat, berisi Pola Pemerintahan Mataram Islam. Bab Kelima, berisi tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan dalam riset selanjutnya.

